



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
5. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
6. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
7. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

8. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Koodinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepemudaan, berupa dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi, koordinasi, dan program serta kegiatan pelayanan Kepemudaan tahun 2023 – 2027 di DIY.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepemudaan, dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya di DIY;
- b. tercapainya peningkatan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan DIY;
- c. meningkatkan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan kepemudaan, agar lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda di DIY yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing; dan
- d. tersedianya perangkat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD pelayanan kepemudaan dan/atau berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode 2023 - 2027.

BAB III

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan di DIY.
- (2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. efektifitas pelayanan kepemudaan;
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan
 - c. kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (3) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di DIY dilaksanakan pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023 – 2027.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pembangunan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;

- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui Pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan kerakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses Pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas di DIY;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB IV

STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 8

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah DIY melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan/atau kegiatan Pelayanan Kepemudaan antar Perangkat Daerah di DIY;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah DIY;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dan/atau melakukan kemitraan antar organisasi pemerintah daerah dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan 2023 – 2027.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023 – 2027 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan DIY tahun 2023 – 2027 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, program, kegiatan, dan rincian output;
 - c. indikator;
 - d. acuan dasar (*baseline*);
 - e. target; dan
 - f. Perangkat Daerah.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DIY

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- (3) Susunan dan personalia Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tugas Tim

Pasal 12

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan:

- a. arahan;
- b. saran; dan

- c. pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 13

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari Tim Pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Pengarah.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Penetapan keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah DIY dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan/atau kegiatan dalam RAD pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Mekanisme Kerja Tim

Pasal 17

Hubungan kerja internal Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY bersifat koordinatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 18

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pemantauan penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan tingkat kabupaten/kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 82

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 82 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 – 2027

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 – 2027

A. DOMAIN PENDIDIKAN

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran dan pemberdayaan Pemuda	Domain pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun	9.64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	Dikpora DIY dan Dikpora Kabupaten/Kota
	1. Rata-rata lama sekolah pemuda 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pemuda 3. Angka partisipasi kasar perguruan	Angka partisipasi kasar sekolah menengah	101.9	101,9	102	102.1	102,2	102,3	Dikpora DIY dan Dikpora Kabupaten/Kota

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran tinggi	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	Bentuk koordinasi: a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui Pendidikan	pertama (SMP)/Madrasah tsanawiyah (MTS) sederajat							
	b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui Pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi,	Angka partisipasi kasar sekolah menengah atas (SMA/SMK)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat	119,58	119,59	120	120,1	120,2	120,3	Dikpora Provinsi, Perusahaan, Masyarakat
		Angka partisipasi kasar	75,59	76	76,21	76,42	76,63	77	Pemda DIY & Perguruan Tinggi di DIY serta berbagai

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	dan karakter kebangsaan;	perguruan tinggi							pemangku kepentingan lain.
	c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51.30	51,32	51,33	51,35	51,36	51,38	Dikpora Provinsi
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui Pendidikan								
	Sosialisasi beasiswa bagi pemuda untuk melanjutkan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk	9.64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	Bappeda DIY, Dikpora DIY (BPO), Dikpora Kabupaten-kota, Biro

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	pendidikan tinggi	Umur ≥ 15 Tahun	75,59	76	76,21	76,42	76,63	77	Tata pemerintahan, Biro Pemberdayaan Masyarakat & Kalurahan, Dinas PMD Kabupaten/kota, Kalurahan-bekerja sama dengan karang taruna
	Sosialisasi tentang penyadaran pemuda - Mengurangi angka putus sekolah & pembentukan karakter “pemuda sehat-mental”	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi							Dikpora (BPO), satuan pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN DIY. Kesbangpol DIY, LSM-Rifka Annisa, PKBI Yogyakarta-POLDA DIY.
	Kerjasama dengan								Bappeda-Dikpora,

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	perguruan tinggi di DIY–afirmasi beasiswa bagi pemuda DIY								Perguruan Tinggi di DIY.
	Kerjasama Pemda dengan CSR perusahaan untuk mengakses beasiswa bagi pemuda DIY								Bappeda-Dikpora DIY, Dinas Sosial, CSR Perusahaan seperti BUMN (PLN, Pertamina dan lain-lain) untuk mengakses dana CSR untuk beasiswa pendidikan
	Peningkatan kesadaran Pemuda melalui Pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan								

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	Sosialisasi “toleransi-praktik pendidikan inklusi-peningkatan penyadaran Pemuda melalui Pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan	Angka partisipasi kasar sekolah menengah atas (SMA/SMK)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat	119,58	119,59	120	120,1	120,2	120,3	Dikpora (BPO), satuan pendidikan, Kesbangpol DIY, LSM LKIS-Satu Nama Yogyakarta
	Bimbingan teknis “Pemuda Kreatif,								Dikpora (BPO), Dinas Pertanian, Dinas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	Mandiri dan Berdikari”								Perindustrian, Dinas Koperasi, KADIN, dan lain-lain.
	Pelatihan Pemuda “paham dan cintai budaya Yogyakarta								Dikpora DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Komunitas seniman DIY
	Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal								
	Sosialisasi Beasiswa bagi Pemuda → dukungan untuk pemuda dari keluarga miskin	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	9.64 75,59	9,65 76	9,66 76,2	9,68 76,42	9,7 76,63	9,72 77	Dinas Sosial, Dikpora (BPO), Kalurahan-melalui keluarga yang mendapatkan jaring pengaman sosial.

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Base-line 2022	Target					OPD Koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	Edukasi bagi pemuda disabilitas –”setara dan kompeten”	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi		1					Dikpora DIY, LSM,Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan perusahaan.
	“Satu rumah satu sarjana”								Bappeda-Dikpora-Biro tata pemerintahan, Biro Pemberdayaan Masyarakat & KalurahanDinas PMD Kabupaten/kota, Kalurahan-BUMDESA, keluarga yang mendapatkan jaring pengaman sosial yang memiliki anak usia pendidikan tinggi.

B. DOMAIN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEMUDA

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
Program sinergis antarsektor dalam hal: Pengembangan kepemimpinan & Kepeloporan Pemuda	Bentuk Koordinasi: Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan.	11,32	11,35	11,50	11,65	11,70	11,85	Dikpora DIY (BPO), Kesbangpol, Biro Bermas, Dinas Sosial DIY
	Program: Pengembangan Kepeloporan pemuda								
	Pelatihan <i>Crowd Funding</i> Luaran: Membekali peserta dengan kemampuan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi. (orang)	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Dikpora DIY (BPO), Kesbangpol, Biro Bermas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	menggalang serta mengelola dana masyarakat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas	Jumlah pemuda yang terlibat kegiatan. (orang)							
	Pendidikan Ekonomi – Sosial Kepemudaan Luaran: Membekali pemuda dengan pemahaman dan kepekaan akan kondisi sosial-ekonomi masyarakat beserta peluang-	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (orang)	0	50	75	100	125	150	Dikpora DIY (BPO), Kesbangpol, Biro Bermas
			50%	55%	60%	65%	70%	75%	

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	peluang partisipasi pemuda yang hadir dalam kondisi tersebut								
	Pendidikan Pengorganisasian dan <i>Networking</i> Pemuda Luaran: Membekali para anggota organisasi pemuda untuk mengkampanyekan isu, menggalang solidaritas, dan mengembangkan jejaring organisasi terhadap Pemda		0	250	250	250	250	250	

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan. kepemudaan								
Program: pengembangan kepemimpinan pemuda									
	Pendidikan Dasar-Dasar Kepemimpinan Untuk Pelajar SMA Luaran: Membekali para pelajar terhadap pentingnya organisasi bagi pengembangan	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat Jumlah siswa SMA dan setingkatnya yang terfasilitasi (orang)	50% 200	55% 300	60% 400	65% 500	70% 500	75% 500	Dikpora DIY (BPO), Kesbangpol, Biro Bermas, Satuan Pendidikan, organisasi pemuda. Dikpora DIY (BPO),

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	dirinya ketika sudah menyelesaikan pendidikan menengah.								Satuan Pendidikan, Forum OSIS DIY
Kajian dan Penelitian Kepemudaan & Kepeloporan pemuda	<u>Bentuk Koordinasi:</u> Penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan	Jumlah Kajian tentang persoalan pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan	1	2	2	2	2	2	Bappeda, Biro Bermas, BKKBN, Biro Bina Mental Spiritual, DP3AP2.

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	kegiatan Kepemudaan terkait persoalan pemuda								
Program: Kajian dan Penelitian Kepemudaan & Kepeloporan pemuda									
	1. Pembuatan Sistem Informasi Kepemudaan Luaran: Terbentuknya sistem informasi kepemudaan berisi data base anggota organisasi pemuda, aktivitas organisasi pemuda, dan monitoring hasil-hasil	Jumlah sistem informasi kepemudaan yang terbangun di DIY	0	1	1	1	1	1	Dikpora (BPO (Kord) Bappeda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas PMD Kabupaten/ Kota se-DIY

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2021	Target					OPD koordinator/ Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	pelatihan yang telah diselenggarakan OPD dalam bidang pelayanan kepemudaan.								

C. DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

Koordinasi strategi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline (2022)	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
Program sinergis antarsektor dalam hal	Domain kesempatan dan lapangan kerja 1. Pemuda wirausaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda	65.57%	65,59 %	65,61%	65,63%	65,65 %	65,67 %	Disnakertrans, Disdikpora, Perguruan tinggi, dan Diskominfo

pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	kerah putih; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda. Bentuk Koordinasi: Peningkatan daya saing wirausaha pemuda	Pemuda bekerja	60,34%	61,84 %	63,34%	64,84%	66,34 %	67,84 %	Disnakertrans, Disdikpora, dan Perguruan tinggi.
		Kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	6,67%	7.50%	8,89%	9,09%	9,23%	9,33 %	Disdikpora, Diskop UMKM, Disnakertrans, dan Diskominfo
		Kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	15 kelompok	15 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	25 kelompok	30 kelompok	Disdikpora, Diskop UMKM, Disnakertrans, dan Diskominfo
Program Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda									

Penyelenggaraan bursa kerja		0	0	100 orang	120 orang	150 orang	180 orang	Disnakertrans, Disdikpora, dan Perguruan tinggi
Pelayanan, penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online		2 dokumen	BPO, Disnakertrans, Diskop UMKM, dan Diskominfo					
Program Pemuda Bekerja								
Peningkatan lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha		52%	54%	56%	58%	60%	62%	Disnakertrans dan Disdikpora
Pelatihan SDM K3		n/a	n/a	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	Disnakertrans dan Disdikpora
Pelatihan dan pendampingan di		280 orang	20 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	Disnakertrans, Diskop UMKM,

tempat magang								dan Hipmi
Lulusan pelatihan yang terampil		91%	n/a	95%	96%	96%	97%	Disnakertrans dan Diskop UMKM
Tenaga kerja yang tersertifikasi		340 orang	n/a	160 orang	180 orang	200 orang	220 orang	Disnakertrans
Pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah		10 dokumen	5 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Disnakertrans dan Diskop UMKM
Program Kelompok Usaha Pemuda di Kantong Kemiskinan yang Memiliki Rintisan Usaha								
Peningkatan kompetensi SDM dalam pengetahuan UKM dan kewirausahaan		-	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	180 orang	BPO, Diskop UMKM, Hipmi, dan Kadin
Tempat kerja dengan kategori produktivitas		n/a	60%	65%	70%	75%	80%	Disnakertrans, Diskop UMKM,

baik									Hipmi, dan Kadin
Program Kelompok Pemuda pada Kantong Kemiskinan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan									
Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pada kantong kemiskinan melalui kewirausahaan		15 kelompok	15 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	25 kelompok	30 kelompok		BPO, Diskop UMKM, Disnakertrans, dan Hipmi
Tumbuhnya wirausaha/calon wirausaha baru		n/a	70%	75%	75%	75%	75%		Disnakertrans dan Diskop UMKM

D. DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran Pemuda	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan 1. Angka Kesakitan pada pemuda 2. Perilaku Merokok pada pemuda 3. Kehamilan Pemuda 4. Angka	Terpenuhinya pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	93,1	93,1	93,6	94,6	94	94	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	n/a	3	3	3	3	3	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	kejahatan pada pemuda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)	n/a	10	11	11	11	11	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
	Bentuk koordinasi: a. Peningkatan layanan untuk menurunkan angka kesakitan pada pemuda b. peningkatan layanan untuk mengurangi perilaku merokok	Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	n/a	5	5	5	5	5	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
	c. peningkatan partisipasi kelompok usia produktif untuk								

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	mencegah kehamilan di usia remaja	Usia Produktif							
	d. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan baik menjadi pelaku maupun korban	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	87	90	95	100	100	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian
	e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks								

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;								ian Daerah DIY
	f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial; g. peningkatan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	55	60	70	80	90	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	<p>pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;</p> <p>h. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental</p> <p>i. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika,</p>								<p>Penduduk, Kepolisian Daerah DIY, Polisi Pamong praja, Badan Kesbangpol</p>

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
	psikotropika, dan zat adiktif lainnya;								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan (UKP) dan upaya Kesehatan masyarakat (UKM)	Terpenuhinya pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	93,1	93,1	93,6	94,6	94	94	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY
		Persentase keberhasilan pengobatan TBC	83	84	85	86	87	88	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	59	60	62	63	64	65	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
		Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100	100	100	100	100	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan	45	76	77	78	78	80	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		pengobatan secara teratur							Olahraga , Dinas Pendidikan
		Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76	77	78	78	80	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
		Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk	13	14	15	16	17	17	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		pengecahan kanker servik dan kanker payudara							
		Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	18`	25	30	40	50	50	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
		Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan	70	71	72	73	74	75	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		secara standar							Pendidikan
		Persentase remaja putri anemia	22,9	22,2	21,5	20,8	20,1	19,3	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	N/A	6	6	6	6	6	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Kesehatan Ibu dan Anak							Pendidikan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	n/a	5	5	5	5	5	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	n/a	8	8	8	8	8	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Gizi Masyarakat							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	n/a	2	2	2	2	2	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	n/a	4	4	4	4	4	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Olahraga , Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	n/a	3	3	3	3	3	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan Olahraga , Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	n/a	10	11	11	11	11	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY , Dinas Pemuda dan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)							Olahraga , Dinas Pendidikan
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	n/a	815.000	825.000	832.000	840.000	840.000	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY,

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
	pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	n/a	n/a	100	100	100	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja DIY
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
	program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	87	90	95	100	100	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan,

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
									Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian Daerah DIY
		Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi perlindungan Perempuan yang	100	100	100	100	100	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		diImplementasikan dengan baik							Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian Daerah DIY
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik (orang)	757	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
									Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian Daerah DIY
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	55	60	70	80	90	100	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
									Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian Daerah DIY, Polisi Pamong praja
		Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa	100%	100	100	100	100	100	Bappeda DIY, Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah DIY

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	3732	3735	3734	3734	3734	3734	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian
		Tingkat konsumsi energi, berdasarkan	2747	2745	2743	2741	2739	2137	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)							Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK/Bangga Kencana (Advokasi dan	75,89	75,89	76	76,5	77	77,5	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator	Baseline 2022	Target					OPD Koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
		KIE)							Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

E. DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Koordinasi lintas sektor/OPD	Domain IPP/Bentuk Koordinasi Program/Kegiatan/Rincian Luaran	Indikator IPP	Baseline 2022	Target					OPD koordinator/Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027	
Program penyadaran, pemberdayaan, serta	1. Pernikahan Usia Anak 2. Partisipasi pemuda	Persentase pemuda perempuan berusia 20-24	111	101	91	81	71	61	DP3AP2, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dikpora (BPO), Kemenag Kanwil DIY,

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda	perempuan di pendidikan menengah dan tinggi	tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20-24 tahun (persen/%)							Dinsos
	3. Perempuan bekerja								DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dikpora (BPO), Pemda DIY
	Bentuk Koordinasi:								
	1. Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas,	Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/	108.61	108.7	108.8	108.9	109.0	109.1	DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dikpora (BPO), Disnakertrans

	prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , dan perdagangan manusia;	sederajat atau lebih tinggi (persen/%)							
2.	Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial	Persentase Pemuda perempuan berusia 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal (persen/%)	414.496	415.496	417.500	419.500	421.500	423.500	
3.	Peningkatan perlindungan Pemuda								

	terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan								
Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas dan segala perilaku yang mengancam penurunan kualitas moral lainnya									DP3AP2, Dikpora (BPO), Dinas Kesehatan, BKKBN, Satuan Pendidikan
	Penurunan angka PUA								
	Kegiatan/Program:								
	1. Kampanye dan edukasi yang inovatif tentang resiko KTD dan atau PUA di tingkat kelurahan yang melibatkan tenaga ahli	Jumlah KTD	758	700	650	600	550	500	
		Usia pernikahan perempuan di bawah 21 tahun	5457	3500	3400	3300	3200	3100	
		Jumlah SMP (kelas 9) yang memiliki kurikulum Kespro	0	0	50	100	150	200	

	kesehatan (SPoG dan psikolog anak dan remaja)	Jumlah SMA yang memiliki kurikulum Kespro	0	0	20	40	60	80	
	2. Sosialisasi materi Kespro di kurikulum sekolah (SMP tingkat akhir dan SMA) yang masuk dalam lingkup Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah PIK-R aktif di tingkat pedukuhan	N/A	15	30	45	60	75	
	3. Membentuk forum komunitas pegiat/kader PIK-R se-DIY yang berkolaborasi dengan Forum								

	<p>Pemuda Pelopor dan komunitas pemuda lainnya (diskusi reguler bulanan, pertunjukkan seni budaya, <i>public talkshow</i>, <i>podcast</i>)</p> <p>4. Membentuk forum/ komunitas perempuan muda ibu rumah tangga di tiap kelurahan (champion ibu muda) di jaringan DESA PRIMA</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program penyadaran, pemberdayaan, kepeloporan Pemuda dan melalui Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan									
Partisipasi pemuda di pendidikan		108.61	108.7	108.8	108.9	109.0	109.1		
Kegiatan/program: Beasiswa (SMA dan universitas) khusus pemuda miskin dan berkebutuhan khusus di setiap kelurahan (Jaringan Desa Prima)	Angka Partisipasi Kasar peserta didik perempuan tingkat SMA	231.163	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	Dikpora DIY, DP3AP2 DIY, Dinas Sosial	
	Persentase lulusan perempuan tingkat Perguruan Tinggi Persentase Sekolah Ramah Anak	39.3	40	41	42	43	44	Dikpora DIY, DP3AP2 DIY, Dinas Sosial	

		Jumlah Desa Prima yang memberi beasiswa untuk perempuan tingkat SMA dan PT	0	0	10	20	30	40	
		Jumlah pemuda perempuan peserta Kejar Paket-C	2482	3873	4500	5500	6500	7500	
	Perempuan bekerja								
	Kegiatan/program:								DP3AP2 DIY, Disnaker DIY, Dikpora (BPO) DIY
	Kegiatan pendidikan dan	Angka pekerja perempuan di sektor formal	414.496	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000	
	Sosialisasi dan implementasi UU	Angka pekerja perempuan di	593.882	610.000	620.000	630.000	640.000	650.000	

	No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	sektor informal							
		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan untuk perempuan	N/A	200	250	300	350	400	
		Jumlah perempuan yang menduduki jabatan manajerial	111.407	112.407	113.407	114.407	115.407	116.407	
		Jumlah sosialisasi	N/A	20	50	100	150	200	

		UUTPKS di instansi/badan usaha dan kelompok masyarakat								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X